

BAB III

PENYAJIAN DATA

3.1 Identifikasi Informan

Berikut daftar informan pada penelitian evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusi tingkat sekolah dasar pada SDN Tugu Utara 11 :

1. Nama : Drs. H. Iskandar, MM
Keterangan : Kepala Seksi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Nama : Titi Nurniati, S.Pd
Keterangan : Kepala Satuan Pelaksanaan Pendidikan Kecamatan Koja
3. Nama : Casmiasi, S.Pd
Keterangan : Kepala Sekolah SDN Tugu Utara 11
4. Nama : Kurniawan, S.Pd
Keterangan : Guru reguler SDN Tugu Utara 11
5. Nama : Sri
Keterangan : Orang tua siswa berkebutuhan khusus (Akmal) ADHD
6. Nama : Mufarokhah
Keterangan : Orang tua siswa berkebutuhan khusus (Agnia Dwi) ADHD
7. Nama : Alvin
Keterangan : Orang tua siswa berkebutuhan khusus (Rasya)

8. Nama : Yani

Keterangan : Orang tua siswa reguler (Syifa)

3.2 Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pada SDN Tugu Utara 11

Kecamatan Koja

Evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusi pada SDN Tugu Utara 11 dapat dilihat melalui dimensi penyelenggaraan pendidikan inklusif dan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan sebagai berikut :

3.2.1 Efektivitas

Kebijakan dan Regulasi kebijakan pendidikan inklusif terkait dengan tersedianya peraturan yang mengatur tentang kebijakan tersebut. Efektivitas suatu kebijakan terlihat dari pencapaian tujuan dan hasil (akibat) yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Hasil yang diinginkan dari kebijakan pendidikan inklusif di Jakarta sendiri tertera pada regulasi yang mengaturnya seperti peraturan gubernur, surat edaran, dan permendiknas. Aktor-aktor kebijakan pendidikan inklusi tentu saja harus mengetahui peraturan atau regulasi yang mengatur kebijakan tersebut dan aktor-aktor pada lokasi penelitian ini telah mengetahui adanya regulasi tersebut, namun tidak semua aktor dapat menyebutkan nama peraturan dengan detail. Berikut pernyataan Bapak Iskandar selaku Kasi Pendidikan Dasar dan PKLK (Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus) Kota Administrasi Jakarta Utara Wilayah II:

“Landasan hukumnya salah satunya tadi Surat Edaran Nomor 119 /SE/2016 Tentang Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi sifatnya situasional. Ada lagi sebentar pergubnya ada. Permendikbud ada, Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009.”

(Wawancara pada Mei 2017)

Berikut pernyataan dari Pak Kurniawan selaku guru reguler di SDN

Tugu Utara 11 :

“Iya ada peraturan yang mengatur ada. Yang tertera seperti pertama sekolah inklusi tidak boleh tinggal kelas, pada batasan usia maksimal diterima itu tingkat SD kayanya 15 tahun.”

(Wawancara pada Mei 2017)

Efektivitas pada dimensi sumber daya manusia pada kebijakan pendidikan inklusif dapat terlihat dari apakah sumber daya manusia yang ada berperan serta secara efektif dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Faktor penting terkait dengan sumber daya manusia pada penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah guru-guru atau tenaga pengajar reguler di sekolah inklusi. Hal ini dikarenakan guru pengajar reguler merupakan tenaga pengajar yang senantiasa aktif di dalam proses pembelajaran setiap harinya. Guru pengajar reguler di sekolah inklusi yang ditemui peneliti memiliki riwayat pendidikan umum dan bukan terkhusus pada penanganan pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus pada sekolah inklusi. Berikut pernyataan Ibu Titi, Kepala Satuan Pelaksana Suku Dinas Pendidikan Kecamatan Koja :

“ Keterbatasan guru yang tidak mempunyai bekal khusus untuk menangani anak inklusi. Itu yang menjadi kesulitan. Jadi mohon maaf ya kita kasihan seperti itu. Di satu sisi harus mendapatkan haknya tapi di sisi lain kalau di sekolah negeri inklusi itu kan, gurunya pendidikan biasa.”

(Wawancara Mei 2017)

Begitu pula pada SDN Tugu Utara 11, guru reguler merupakan guru-guru yang memiliki riwayat pendidikan umum dan memiliki pengetahuan dan

pemahaman yang berbeda bagaimana melaksanakan proses pembelajaran di sekolah inklusi. Berikut pernyataan Kepala Sekolah SDN Tugu Utara 11, Ibu Casmiasi, S.Pd :

“Sekolah ini kan re-grouping, 11 dan 12. Nah 11 itu kan tadinya tidak inklusi, yang memang inklusi itu 12 tadinya. Jadi kalo guru 12 dia sudah dapat pelatihan, jadi cukup paham dengan keadaan lingkungan ABK, tapi kalo 11 kan baru jadi belum tahu betul bagaimana menghadapi anak-anak seperti itu.”
(Wawancara pada Mei 2017)

Pernyataan dari Ibu Casmiasi tadi senada dengan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Kurniawan, selaku guru reguler di SDN Tugu Utara 11 sebagai berikut :

“Ya pastilah banyak kesulitan, namanya kita juga baru mengenal, jadi ya masih belajar bagaimana untuk penanganannya, ya macam-macam dah. Dari perangkat pembelajarannya kan kita juga masih belum paham, bikin RPP seperti apa silabus, profil nya terus asesmen kan gimana. Biar pun sebenarnya kan asesmen harusnya yang ahli, cuma kita kan sebagai guru harus mengetahui juga, sebagai acuan buat guru kelas.”
(Wawancara pada Mei 2017).

3.2.2 Efisiensi

Efisiensi terkait dengan usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang efisien dibutuhkan sumber daya manusia tenaga pengajar yang memahami secara penuh konsep pendidikan inklusi dan penerapannya. Oleh karena itu pelatihan tenaga pengajar sangat diperlukan untuk guru-guru reguler di sekolah inklusi. Pelatihan terkait dengan penanganan ABK dan penyelenggaraan pendidikan inklusi diadakan secara berkala. Berikut pernyataan Bapak Iskandar selaku Kasi Pendidikan Dasar dan PKLK

(Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus) Kota Administrasi Jakarta Utara

Wilayah II:

“Ada pelatihan. Kalau Sudin kita masih pake yang di Propinsi, yang pasti mereka mengundang temen-temen, narasumber-narasumber dari LPMP, dari UNJ, jadi memang bidang khusus. Kalo ada yang seperti itu kan memang tinggal kita laksanakan sesuai dengan kebutuhan. Ada (pelatihan untuk guru dan kepala sekolah). Pelaksananya di Propinsi. Jadi kegiatan itu satu, sumber dana dari pusat, kemudian ada dinas, jadi anggaran itu bersumber dari APBD dan APBN. Ada anggaran khusus untuk sekolah inklusi buat pelatihan-pelatihan. Kalo buat biaya ada APBD, tapi karena memang mereka sekolah di negeri kan udah dianggap semua peserta didik.”

(Wawancara pada Mei 2017)

Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan Bapak Kurniawan, salah satu guru di SDN Tugu Utara 11 sebagai berikut :

“ Saya ikut pelatihan dari lembaga swasta. Itu khusus untuk penanganan anak berkebutuhan khusus. Kayanya itu ada juga kerjasama sama pihak asing deh. Itu pelatihannya sampai satu tahun, berkala. Pengajarnya juga itu para pemerhati inklusi sendiri, aktivis baik dalam negeri maupun luar negeri. Dilakukan berkala setiap hari Sabtu. Ada kerjasama dengan dinas pendidikan juga. Jadi ga semua sekolah, cuma beberapa sekolah yang dijadikan rintisan inklusi. Jadi kan diarahkan sebagai pusat sumber ya nantinya. Ini juga kan Ibu Kepala Sekolah kan dapet undangan dari Kedubes Australi tuh tentang pendidikan inklusi dari dinas. “

(Wawancara pada Mei 2017)

Efisiensi pada dimensi Sarana dan Pendanaan terkait dengan usaha yang dilakukan terkait dengan sarana dan pendanaan untuk mencapai tujuan. Sarana dan pendanaan yang memadai menjadi hal penting di dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Hal ini dikarenakan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus lebih kompleks dibandingkan dengan siswa reguler. Namun pada kenyatannya tidak ada dana tetap yang khusus dianggarkan untuk sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Berikut pernyataan Bapak

Iskandar selaku Kasi Pendidikan Dasar dan PKLK (Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus) Kota Administrasi Jakarta Utara Wilayah II:

“Kalau buat biaya ada dari APBD, tapi karena mereka memang sekolah di negeri udah dianggap semua peserta didik. Jadi anggarannya kaya sekolah negeri biasa, bukan dikhususkan ada anggaran sekolah inklusif, kan umum. Bantuan dana khusus untuk siswa berkebutuhan khususnya juga tidak ada”

(Wawancara pada 6 Mei 2017)

Pada penyelenggaraan pendidikan inklusi juga diperlukan usaha maksimal pada dimensi publikasi dan sosialisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Publikasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan pendidikan inklusi kepada masyarakat dilakukan dengan beberapa hal seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kurniawan, guru reguler di SDN Tugu Utara 11 sebagai berikut :

“ Ada di pasang banner. Terus kan ada juga itu tahap PPDB di situ, ada jadwalnya. Orang tua murid kan juga bisa melihat secara online, ada spanduk di depan juga kapan penerimaan. Jadwalnya biasanya dia lebih awal.”

(Wawancara pada Mei 2017)

Selain itu, masyarakat juga mengetahui tentang sekolah penyelenggara pendidikan inklusi ini dari mulut ke mulut seperti yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN Tugu Utara 11, Ibu Casmiasi, S.Pd :

“Dari mulut ke mulut sih pada tahu. Kita juga ada PPDB khusus inklusi, lebih duluan. Kalau inklusi duluan sebelum reguler ada pendaftaran di awal untuk inklusi. Cuma ya itu jumlahnya terbatas.”

(Wawancara pada Mei 2017)

Hal ini senada dengan pernyataan Ibu Sri selaku orang tua siswa Akmal, siswa berkebutuhan khusus sebagai berikut :

“ Waktu itu saya ada yang ngasih tahu. Sekarang udah ada tuh pemerintah, SD ada inklusinya. Tadinya saya bingung mau

dimasukkin kemana nih ya gitu....Dari temen taunya, ayuk Akmal mau sekolah ga.”
(Wawancara pada Mei 2017)

3.2.3 Kecukupan (*Adequacy*)

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa kecukupan berkaitan erat dengan apakah suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan atau tidak. Kecukupan pada dimensi kebijakan dan regulasi berkaitan erat dengan apakah kebijakan pendidikan inklusif yang ada saat ini sudah cukup mengakomodasi terselenggaranya kebijakan tersebut. Di DKI Jakarta sudah terdapat kebijakan dan regulasi yang mengatur pendidikan inklusif, namun hal yang perlu disoroti adalah kebijakan pendidikan inklusif di Jakarta masih belum memiliki petunjuk teknis khusus yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif secara detail. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Iskandar selaku Kasi Pendidikan Dasar dan PKLK (Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus) Kota Administrasi Jakarta Utara Wilayah II :

“ Setiap tahun juklak juknisnya ga ada jadi dari surat edaran aja. Biasanya kalo dulu kan masih pakai fax, tapi sekarang udah ga pakai fax lagi. Disebar jadi lanjut dari mulai kepala dinas, kemudian disampaikan ke Sudin terus ke sekolah.”
(Wawancara pada Mei 2017)

Berikut pernyataan dari Kepala Sekolah SDN Tugu Utara 11, Ibu Casmiasi, S.Pd :

“Kita suka ada pelatihan-pelatihan, kemarin juga udah Ibu kirim Pak Wawan untuk inklusi ada pelatihan. Ada pelatihan-pelatihan khusus inklusi memang tapi kalo untuk petunjuk teknis ga ada (dari dinas). Pelatihan aja.”
(Wawancara pada Mei 2017)

Hal ini senada dengan pernyataan Bapak Kurniawan, salah satu guru di SDN Tugu Utara 11 sebagai berikut :

“ Belum ada kayaknya. Belum secara detail. Cuma ya kita istilahnya ya masih belajar, secara penyesuaian seperti apa bagaimana ga ada. Jadi belum ada, baru ya gitu.”
(Wawancara pada Mei 2017)

Petunjuk teknis di dalam suatu kebijakan diperlukan agar para aktor pelaksana kebijakan dapat mengetahui secara utuh hasil yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Tidak adanya petunjuk teknis dari kebijakan pendidikan inklusi tentu mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pendidikan inklusi di SDN Tugu Utara 11.

Kecukupan pada dimensi kelembagaan dalam kebijakan pendidikan inklusif dapat terlihat pada kecukupan jumlah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di masing-masing wilayah. Menurut pernyataan informan, di Jakarta Utara saat ini sudah ditetapkan bahwa semua sekolah harus menerima ABK, hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN Tugu Utara 11, Ibu Casmiasi, S.Pd:

“Kalo yang ibu tau sekarang ini SD-SD reguler itu, semua harus wajib menerima ABK. Kayanya sih harus semua harus menerima. Jadi bukan sekolah khusus yang ditunjuk inklusi aja, tapi semua wajib menerima untuk regulernya. Kayanya sih seperti itu yang Ibu denger.”
(Wawancara pada Mei 2017)

Hal ini Berikut pernyataan Ibu Titi, Kepala Satuan Pelaksana Suku Dinas Pendidikan Kecamatan Koja :

“Arahan dari kepala dinas, sekolah harus menerima siswa inklusi.”
(Wawancara pada Mei 2017)

Pada dimensi sumber daya manusia (SDM) tenaga pengajar pada penyelenggaraan pendidikan inklusif terdiri atas Guru Pembimbing Khusus (GPK) dan guru pengajar reguler. Pada penyelenggaraan pendidikan inklusi keberadaan Guru Pembimbing Khusus menjadi hal yang sangat vital pada sekolah inklusi, namun pada kenyataannya keberadaan GPK masih sangat terbatas dan bahkan tidak semua sekolah inklusi memiliki GPK, begitu juga dengan SDN Tugu Utara 11 seperti yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN Tugu Utara 11, Ibu Casmiasi, S.Pd sebagai berikut :

“....Dari sekolah lain disalurkan ke sekolah sini. Cuma Ibu terbatasnya karena tidak ada guru pembimbingnya, jadi ibu suka kasih saran di sini memang tidak ada guru pembimbingnya, walaupun di sini dikatakan sekolah inklusi tapi guru khusus pembimbingnya tidak ada. Pada saat itu memang pernah ada, pernah ada guru khusus cuma ya honor paling seberapa sih, Neng. Dia sekarang pindah ke Marunda 02.”
(Wawancara 8 Mei 2017)

Pernyataan dari Ibu Casmiasi tadi senada dengan dengan pernyataan yang disampaikan oleh bapak Alvin, orang tua dari Rasya, siswa berkebutuhan khusus kelas I dan Ibu Sri, orang tua dari Akmal, siswa berkebutuhan khusus kelas 2 sebagai berikut :

“Belum sih saya belum tau. Kayanya ga ada deh.”

“Waktu itu di sini juga ada tuh guru khususnya, ada Bu Endah pas kelas satu, nah setelah itu dia keluar. Di kelas 2 ini ga ada. Kebagian setahun, nah yang sekarang ga dapet guru pembimbing khususnya. Tadinya sekolah ini terkenal bagus, inklusinya. Iya tadinya ada, makanya tadinya kan saya ngelamar nya di Menteng ya katanya itu ada inklusi. Kepala sekolahnya tapi bilang ‘ibu saya sih bukan ga mau nerima, ibu ngelamar aja di sekolah UKA, online itu bisa, sekolah UKA aja dulu. Satu supaya lebih dekat dua karena di situ udah ada gurunya’. Akhirnya di sini diterima ternyata Akmal. Udah setahun awal ada GPK, nah kelas 2 ini ga ada. Pas Akmal naik kelas 2 ga ada.”

(Wawancara pada Mei 2017)

Pada penyelenggaraan pendidikan inklusif juga terdapat sumber daya manusia pengawas yang tugasnya mengawasi pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah yang memang ditunjuk sebagai sekolah inklusif. Namun berdasarkan pernyataan Bapak Kurniawan selaku Guru di SDN Tugu Utara 11, jumlah pengawas untuk sekolah inklusif masih sedikit sehingga beban kerjanya terlalu banyak, seperti disampaikan berikut ini:

“Ada pengawasnya sendiri. Ada inklusi ada, ada, jadi satu kota satu . Satu kota itu, jakarta wilayah. Jadi ga terlalu banyak, dia bergantian ke sekolahnya. Beban kerjanya terlalu banyak, jadi ga seperti halnya pengawas biasa, sekolah reguler biasa, lebih banyak mereka.”
(Wawancara pada Mei 2017)

Hal ini senada dengan pernyataan dari Ibu Casmiasi, S.Pd sebagai berikut :

“Memang ada sih pengawas, ada pengawas inklusi. Mungkin karna terbatas, jadi jarang terjun ke lapangan? Paling untuk pertemuan-pertemuan aja. Kayanya kalo untuk ada pertemuan inklusi baru ada, dari pengawasnya.”
(Wawancara pada Mei 2017)

Penyelenggaraan pendidikan inklusif juga membutuhkan ketersediaan sarana khusus di sekolah. Pada pendidikan inklusif di SDN Tugu Utara 11 sudah terdapat sarana khusus untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Berikut pernyataan dari Ibu Casmiasi, S.Pd, Kepala Sekolah SDN Tugu Utara 11 :

“Alat-alat ada, ada. Apasih namanya misalnya untuk nyusun nyusun...ada alatnya ada. Kebetulan waktu dapat dana itu dibelikan alat peraga. Jadi masih tersimpan, untuk alat pelatih motorik, terus krayon, pensil, segala macem.”
(Wawancara pada Mei 2017)

Dana khusus untuk sekolah inklusif pernah diterima oleh SDN Tugu Utar, namun saat ini sudah tidak ada.

“Dulu pernah ada untuk dana khusus inklusi, untuk alat peraganya.. Mereka kan main alat peraganya.Ya.. macem-macem, alat peraganya, terus juga ada untuk biaya ya itu asismen itu.. biaya asismen, satu orang kena berapa.. Ada kayanya sih. Kalo jaman dulu ada kalo sekarang ga ada.”

(Wawancara pada Mei 2017)

Kurikulum dan pembelajaran merupakan dimensi penting lainnya pada penyelenggaraan pendidikan inklusif . Kurikulum modifikasi diperlukan agar anak berkubutuhan khusus dapat lebih mudah dalam menerima pelajaran sehingga dapat berkembang. Pada penyelenggaraan pendidikan inklusi, pemuasan kebutuhan berkaitan dengan dimensi kurikulum, pembelajaran dan fasilitas (sarana dan prasarana). Tersedianya kurikulum modifikasi dan media pembelajaran khusus yang sesuai dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus menjadi hal yang penting di dalam pemuasan kebutuhan peserta didik khusus di sekolah inklusi. Pada pelaksanaanya sejauh ini, masih belum ada kurikulum modifikasi dan pada pelaksanaan pembelajarannya hanya tergantung pada pemahaman dan kreativitas guru kelas masing-masing disesuaikan dengan kemampuan peserta didik khusus. Berikut pernyataan dari Bapak Iskandar, selaku Kasi Pendidikan Dasar dan PKLK (Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus) Kota Administrasi Jakarta Utara Wilayah II :

“ Tapi mereka ga ada yang khusus untuk inklusi, jadi ya harusnya GPK nya itu. Berbeda dengan SLB, kurikulumnya sudah jelas kalau ini kan sifatnya umum, mereka ikut belajar biasa.”

(Wawancara pada Mei 2017)

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN

Tugu Utara 11, Ibu Casmiasi, S.Pd sebagai berikut :

“ Sebetulnya harusnya ada, neng. Program itunya juga harusnya bikin, pokoknya ada kurikulum khusus. Kurikulum kita pakai kurikulum yang biasa cuma ada tambahan bagi mereka. Seharusnya guru kelas ada tambahan, terus juga ada program.”
(Wawancara pada Mei 2017)

Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan Bapak Kurniawan, salah satu guru di SDN Tugu Utara 11 sebagai berikut :

“ Kurikulum khusus belum ada, masih dirintis. Sebenarnya sih kurikulumnya sama ya, cuma yang membedakan indikatornya aja. Indikatornya dimodifikasi, ada yang dikurangi ada yang dilebihi, ada yang dihapus, tergantung dari kebutuhan si anak ini. Materinya sama, cuma bobotnya aja dikurangin. Bobot materinya iya, siswa yang lain misal matematika kalo perkaliannya udah 2 angka, dia baru 1 angka. Kalau belum bisa perkalian berarti penjumlahan 2 angka. Dikurangi aja gitu. Jadi semuanya kan sama, cuma bobotnya aja dikurangin”
(Wawancara pada Mei 2017).

“ Biasanya ada (rapor khusus untuk ABK). Tapi kan sekarang karena GPK nya sudah vakum tuh tau deh nanti gimana tuh. Biasanya ada narasi, misal si A sudah mengalami perkembangan dalam menulis. Di rapor yang berbeda, ada dua. Kalau sekarang belum tahu, karena belum memahami untuk pelatihannya juga belum (sejauh itu).”
(Wawancara pada Mei 2017).

Selanjutnya, kriteria kecukupan dapat juga kita lihat dari dimensi penyediaan fasilitas atau sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam tercukupinya kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Pada SDN Tugu Utara 11 sudah terdapat sarana penunjang sekolah inklusi seperti ruang sumber yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa berkebutuhan khusus. Selain itu terdapat juga alat-alat pembelajaran khusus seperti alat pelatih gerakan motorik. Namun pada pelaksanaannya, sarana dan prasarana yang telah tersedia tersebut kurang

maksimal dalam digunakan setelah Guru Pembimbing Khusus pindah ke sekolah lain. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN Tugu Utara 11, Ibu Casmiasi, S.Pd sebagai berikut :

“ Sekarang masih vakum belum ada pertemuan khusus di ruang sumber buat anak-anak ABK.”
(Wawancara pada Mei 2017)

Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan Bapak Kurniawan, salah satu guru di SDN Tugu Utara 11 sebagai berikut :

“ Ada ruang sumber, tapi sekarang jarang digunakan. Untuk medianya ada medianya, cuma terbatas. Seperti alat untuk melatih motorik, cara membedakan-membedakan warna, kaya ada mainan kaya kelereng itu kan kaya gitu. Ada ada. Waktu pas jaman Miss Endah digunakan. Karena kan anak inklusi kadang juga ga bisa bedain, kaya pas olahraga misal suruh angkat tangan kanan dia angkat kiri. Ada juga yang tidak bisa memegang pensil jadi motoriknya harus. Tapi belum digunakan maksimal setelah Miss Endah pindah”
(Wawancara pada Mei 2017)

Hal ini juga senada dengan pernyataan Ibu Sri, selaku orang tua siswa berkebutuhan khusus sebagai berikut :

“ Kalo sekarang alat-alat ga dipake, kan ga ada gurunya yang iniin.”
(Wawancara pada Mei 2017)

Selain ruang sumber dan alat peraga, sarana buku-buku tentang inklusi penunjang pembelajaran juga tidak tersedia seperti yang disampaikan Bapak Kurniawan, salah satu guru di SDN Tugu Utara 11 sebagai berikut:

“ Buku tentang pendidikan inklusi kayaknya jarang ya kalo ga ikut pelatihan-pelatihan gitu. Banyak juga buku-bukunya kayanya buku asing semua ya..”
(Wawancara pada Mei 2017)

Kemudian, sarana evaluasi berupa rapor khusus perkembangan siswa berkebutuhan khusus di SDN Tugu Utara 11 saat ini juga sudah tidak ada

sementak Guru Pembimbing Khusus pindah ke sekolah lain. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Sri, selaku orang tua siswa berkebutuhan khusus sebagai berikut :

“ Dulu lagi ada Bu Endah,, rapotnya dua pas dia lagi kelas satu. Kalo sekarang ada satu aja.”
(Wawancara pada Mei 2017).

3.2.4 Perataan (Equity)

Perataan suatu kebijakan dilihat dari apakah usaha yang dilakukan dan manfaatnya telah didistribusikan dengan merata kepada masyarakat. Pada kebijakan pendidikan inklusi hal ini terkait dengan dimensi data dan informasi, serta perataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan inklusi di sekolah penyelenggara. Apakah sudah ada akses data dan informasi yang merata kepada masyarakat luas dan apakah semua pelamar peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendaftar di sekolah inklusi. Perataan informasi tentang diselenggarakannya pendidikan inklusi di SDN Tugu Utara dilakukan melalui rapat koordinasi dengan warga sekolah, termasuk dengan orang tua siswa. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Kurniawan, salah satu guru di SDN Tugu Utara 11 sebagai berikut :

“Biasanya rapat dengan warga sekolah, biasanya perwakilan sih dari orang tua siswa pengurus kelas, berapa orang diwakilkan karena kan tempat juga terbatas. Jadi supaya mereka tahu apa yang menjadi program sekolah, sekaligus juga kan terkadang gantian bergilir per kelas. Kelas satu kapan rapatnya, kita panggil orang tua rapat. Biasanya menjelang-menjelang mau ujian atau saat pembagian rapor, biasanya rapor sih. Dimasukin semuanya termasuk penjelasan tentang inklusi. ”
(Wawancara pada Mei 2017).

Kemudian terkait dengan perataan dalam memperoleh kesempatan yang sama untuk calon peserta didik berkebutuhan khusus yang ingin mendaftar di sekolah inklusi selama mereka memenuhi persyaratan penerimaan. Demikian pula di SDN Tugu Utara 11 juga terlihat dari penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan prosedur penerimaan yakni melalui PPDB online. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Iskandar selaku Kasi Pendidikan Dasar dan PKLK (Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus) Kota Administrasi Jakarta Utara Wilayah II :

“Jadi kan ketika yang namanya PPDB, salah satunya didasarkan atas usia, disortir iya kan. PPDB ketika yang usia, yang lebih tua kan dia lebih cepat masuk. Seperti itu caranya. Misal dia mengisi namanya siapa, terus usianya sudah 7 tahun. Masuk ga dia? Masuk kenapa, karena dia sudah tujuh tahun. Nah itu kan kita ga tahu siapa dia.”
(Wawancara pada Mei 2017).

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN Tugu Utara 11, Ibu Casmiati, S.Pd sebagai berikut :

“Kan kita PPDB ada PPDB khusus inklusi, jadi duluan. Kalau inklusi duluan, sebelum reguler kita ada pendaftaran di awal, inklusi. Cuma ya itu jumlahnya terbatas.”
(Wawancara pada Mei 2017).

Kemudian didukung dengan pernyataan Bapak Kurniawan, salah satu guru di SDN Tugu Utara 11 sebagai berikut :

“Sekarang semuanya negeri ga ada perbedaan sih, lewat PPDB itu, cuman yang membedakan mereka berani apa engga menerima ABK seperti itu. DKI semua dicanangkannya memang mengarah ke sekolah inklusi.”
(Wawancara pada Mei 2017).

Berikut pernyataan Ibu Mufarokhah, selaku orang tua siswa berkebutuhan khusus :

“Saya denger di internet ada inklusi, jadi saya daftar ke sini kan. Suami saya ke sini suruh ke simdik kalo ibu pengen anaknya diakui inklusi terus saya ke pusat, terus daftar ke sini. Karena saya pengen anak saya sama kaya anak yang lain kan. Ya engga 100% sih kan tapi yang penting kan dia bergaul gitu.”
(Wawancara pada Mei 2017).

3.2.5 Responsivitas (*Responsiveness*)

Responsivitas berkenaan dengan bagaimana suatu kebijakan memuaskan kebutuhan kelompok-kelompok masyarakat sasaran. Responsivitas dapat dikaitkan juga dengan dimensi sistem dukungan. Bagaimana respon dan peran serta masyarakat dan warga sekolah terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi, serta mengenai dukungan pemerintah yang responsif terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi. Respon masyarakat ini dapat dilihat dari respon dan interaksi antara siswa reguler dengan siswa berkebutuhan khusus. Pada SDN Tugu Utara 11 sudah terjalin interaksi yang baik antara siswa reguler dengan siswa berkebutuhan khusus. Berikut pernyataan Bapak Kurniawan, salah satu guru di SDN Tugu Utara 11 :

“ Dalam bergaul ya biasa sih, dari temennya sendiri tidak mengolok-olok. Jadi sudah memahami, dulu emang iya tapi kalau sekarang mereka sudah biasa lah. Jadinya semuanya sudah bareng. Orang tua muridnya juga sudah memahami, jadi sudah bukan hal yang baru lagi.”
(Wawancara pada Mei 2017)

Kemudian terkait dengan dukungan dari dinas, sifatnya berupa pengawas khusus sekolah inklusif, namun dikarenakan tenaga yang terbatas,

pengawasan tidak dilakukan secara rutin. Berikut pernyataan Bapak Kurniawan, salah satu guru di SDN Tugu Utara 11 :

“Inklusi ada pengawasnya satu jadi satu kota administrasi satu, jadi ga terlalu banyak, jadi dia bergantian. Jadi beban kerjanya terlalu banyak”

(Wawancara pada Mei 2017)

3.2.6 Ketepatan (*Appropriateness*)

Ketepatan berkenaan dengan tepat atau tidaknya suatu kebijakan. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi hal ini terkait dengan apakah tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusi sudah tercapai sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasaran. Pada SDN Tugu Utara 11, seperti yang di sampaikan oleh berikut:

“Ada pembimbingan dari guru kelas, makanya saya juga bersyukur ya dapet gurunya yang mau lah gitu kan. Dibimbing mah dibimbing, bagus, diarahkan lah gitu. Ya saya mah diterima di sini aja, di sekolah udah Alhamdulillah. Pernah dulu Akmal sekolah di Uswatun, di swasta. Umur 7 tahun dia kan masuk tuh ya di sana, gurunya ga tau kalau Akmal ini begini, saya juga belum tau perkembangan dia kaya gitu kan, sekolahin dia biasa aja. Tapi kayanya gurunya di sana ngeliat kelakuannya kali, namanya anak kaya gini kan tau sendiri ya. Akhirnya dia manggil, ‘Bu, ini Akmal kok kayanya beda sama anak-anak yang lain, lebih aktif’. Nah terus Akmal ga mau sekolah lagi tuh, apa karena gurunya kurang gimana gitu ya, akhirnya kan sama gurunya kenapa, yaudah udah ga mau. Udahlah akhirnya dia ga sekolah lagi tuh setahun. Akhirnya tapi dia bilang ‘Ayo dong mah sekolah lagi’. Waktu di sana sekolah ga mau, dipaksa-paksa gitu ya, nangis mulu kerjaannya di sekolah. Akhirnya daripada saya nya gimana ya, ngituin anak tuh ga mau sama yang lain. Nah pas di sini mah engga tuh dia. Di sini mah mau nulis, di sekolah Uswatun mah ga mau.”

(Wawancara pada Mei 2017)

3.3 Faktor Penghambat Utama Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SDN

Tugu Utara 11

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN Tugu Utara 11 Jakarta Utara masih memiliki berbagai hambatan. Faktor penghambat utama dari kebijakan ini adalah pada faktor sumber daya manusia (SDM) Guru Pembimbing Khusus (GPK) seperti yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN Tugu Utara 11, Ibu Casmiasi, S.Pd sebagai berikut :

“....Dari sekolah lain disalurkan ke sekolah sini. Cuma Ibu terbatasnya karena tidak ada guru pembimbingnya, jadi ibu suka kasih saran di sini memang tidak ada guru pembimbingnya, walaupun di sini dikatakan sekolah inklusi tapi guru khusus pembimbingnya tidak ada. Pada saat itu memang pernah ada, pernah ada guru khusus Cuma ya honor paling seberapa sih, Neng. Dia sekarang pindah ke Marunda 02.”

(Wawancara 8 Mei 2017)